

**LAPORAN KINERJA  
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024  
(5 MARET s.d. 13 MEI 2024)**

**3.3.2.4 Komisi IV**

**3.3.2.4.1 Kinerja Fungsi Legislasi**

**Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE):**

**1. Rapat Tim Perumus/Tim Sinkronisasi** RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Tim Pemerintah dan Komite II DPD RI, tanggal 19 Maret 2024, Menyempurnakan dan menyelaraskan rumusan materi RUU tentang KSDAHE sesuai keputusan Rapat Kerja dan Rapat Panja dengan catatan:

Tim Perumus/Tim Sinkronisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Timus/Timsin tentang KSDAHE) menyepakati Konsep RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), dengan beberapa catatan:

a. Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE menyepakati untuk melakukan perubahan, penambahan, dan penghapusan substansi/rumusan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1990 tentang KSDAHE sebagai berikut:

- 1) mengubah Pasal 1 angka 11 definisi “Genetik” menjadi definisi “Sumber Daya Genetik”;
- 2) menambah Pasal 1 angka 12 definisi “Keanekaragaman Genetik”;
- 3) mengubah substansi dalam Pasal 5A ayat (7) sebagaimana usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan selanjutnya meminta agar KKP dan Kementerian LHK melakukan kesepakatan terkait hal ini;
- 4) mengubah substansi dalam Pasal 13 ayat (5);
- 5) mengubah Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2);
- 6) mengubah rumusan/substansi Pasal 36A ayat (3);
- 7) mengubah judul BAB IX dari PERAN SERTA RAKYAT menjadi PERAN SERTA MASYARAKAT, sebagaimana usulan Pemerintah;
- 8) menghapus Pasal 39A ayat (3) huruf e, sebagaimana usulan Kementerian Hukum dan HAM; serta
- 9) menambah Pasal 40C ayat (5), sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selanjutnya Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE memutuskan untuk melaporkan kepada Panja terkait perubahan, penambahan, dan penghapusan substansi/rumusan RUU tentang Perubahan atas UU

Nomor 1 Tahun 1990 tentang KSDAHE, untuk selanjutnya diambil keputusan dalam Rapat Panja RUU tentang KSDAHE.

- b. Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE memutuskan untuk melaporkan kepada Panja bahwa belum ada kesepakatan antara Panja Komisi IV DPR RI dengan Panja Pemerintah mengenai Ketentuan Pidana. Catatan atas Ketentuan Pidana dimaksud adalah sebagai berikut:
  - 1) Timus/Timsin Komisi IV DPR RI menginginkan ketentuan pidana diatur dengan menggunakan besaran sanksi pidana dengan ketentuan minimum-maksimum.
  - 2) Timus/Timsin RUU KSDAHE sepakat untuk menghadirkan ahli pidana untuk mendengarkan keterangan dan penjelasannya dalam Rapat Panja RUU tentang KSDAHE.
- c. Timus/Timsin RUU tentang KSDAHE memutuskan untuk menyetujui substansi/rumusan Penjelasan atas RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

#### 3.3.2.4.2 Kinerja Fungsi Anggaran

Tidak ada kegiatan fungsi anggaran.

#### 1.3.2.4.3 Kinerja Fungsi Pengawasan

##### 1. Pembentukan Panja

-

##### 2. Kunjungan Kerja

###### a. Kunjungan Kerja Masa Reses

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

###### 1) **Provinsi Sumatera Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Kunjungan ke PT Pupuk Sriwidjaja Palembang untuk meninjau kegiatan *smart farming* dan pengelolaan sampah untuk menjadi pupuk organik (*waste plant*), dilanjutkan diskusi mengenai Pasokan dan Ketersediaan Pupuk Nasional dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan.
- b) Peninjauan ke Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Palembang, Puntikayu, Palembang dalam rangka meninjau Sarana Prasana Kantor BSILHK Sumsel dan dengan tema “Peran BSILHK dalam Pengendalian Perubahan Iklim FOLU Net Sink 20230 dan Target *Net Zero Emission* Pada Tahun 2060”

- c) Kunjungan dan Diskusi mengenai Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagai Penyedia Pangan dan Lapangan Kerja serta Upaya Pengelolaan Limbah Pengolahan Ikan dalam Rangka Mitigasi Kerusakan Lingkungan.

## 2) **Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 29 April s.d. 3 Mei 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Diskusi di Gudang Bulog Batu Cermin, Labuan Bajo terkait Permasalahan Kenaikan Harga Pangan dan Kelangkaan Bahan Pokok di NTT.
- b) Peninjauan dan Diskusi tentang Kelautan dan Perikanan di TPI Labuan Bajo.
- c) Diskusi dan Kunjungan Lapangan tentang Pengelolaan Wisata Alam dan Konservasi Sumber Daya Alam di Taman Nasional Komodo.

## 3) **Provinsi Sulawesi Selatan**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 6 s.d. 10 Mei 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Diskusi terkait pengawasan sumber daya kelautan perikanan dalam upaya pencegahan *IUU Fishing* di Wilayah Kerja di SATKER PSDKP Makassar.
- b) Peninjauan stok CBP Perum Bulog dan diskusi terkait upaya Pemerintah dalam rangka pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah pada Masa Panen Raya di Provinsi Sulawesi Selatan.
- c) Diskusi terkait Pengelolaan Sampah menjadi Pupuk Organik oleh Kelompok Masyarakat Binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

## **b. Kunjungan Kerja Spesifik**

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dilaksanakan ke:

### 1) **Provinsi Banten:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan Ketersediaan dan Kondisi Harga Komoditas Pangan Strategis Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445H di Pasar Modern BSD City.
- b) Diskusi mengenai Ketersediaan dan Kondisi Harga Komoditas Pangan Strategis Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1445H.

**2) Provinsi Jawa Barat:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta dalam rangka meninjau stock dan harga pangan.
- b) Diskusi di Gudang Bulog Ciwangi dalam rangka meninjau stock dan harga pangan.

**3) Provinsi Lampung:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 7 s.d. 9 Maret 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan di Pasar Perumnas Way Halim dalam rangka meninjau stock dan harga pangan.
- b) Peninjauan di Gudang Bulog Lampung dalam rangka meninjau stock dan harga pangan.
- c) Peninjauan di Gudang Pupuk Persewaan Padimas Lampung dalam rangka melakukan pemantauan ketersediaan pupuk untuk persiapan masa tanam 2024.
- d) Pertemuan dan Diskusi di Badan Standardisasi Pertanian (BSIP) Lampung dalam upaya peningkatan produksi dalam rangka menjaga pasokan pangan

**4) Provinsi Banten:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 April 2024, dengan objek kunjungan:

Peninjauan dan Diskusi mengenai Ketersediaan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 di Gudang Bulog Sangiang, Kota Tangerang.

**5) Provinsi Jawa Barat:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 April 2024, dengan objek kunjungan:

- a) Peninjauan di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau stok dan harga pangan
- b) Peninjauan di UPTD RPH Bubulak dalam rangka persiapan menghadapi puncak permintaan daging serta menjamin pasokan daging yang sehat, aman dan bebas penyakit
- c) Peninjauan di Pasar Induk Kemang, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dalam rangka meninjau stok dan harga buah-buahan serta sayur-mayur.

6) **Provinsi Jawa Tengah:**

Kunjungan kerja dilaksanakan tanggal 1 s.d. 3 April 2024, dengan objek kunjungan:

Peninjauan dan Diskusi mengenai Ketersediaan dan Harga Pangan Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 di Pasar Johar Semarang.

**3. Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum**

**a. Rapat Kerja**

- 1) **Raker** dengan **Menteri Pertanian**, tanggal 13 Maret 2024 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai refocusing anggaran untuk reformulasi program/ kegiatan TA. 2024 sebesar Rp7.741.862.053.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima puluh tiga ribu rupiah) untuk mendukung program akselerasi peningkatan produksi padi dan jagung.
  - b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai pengalihan anggaran Kementerian Pertanian ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp1.193.603.071.000,00 (satu triliun seratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga juta tujuh puluh satu ribu rupiah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.S1059/MK02/2023 tanggal 22 Desember 2023, hal Persetujuan Perubahan Alokasi Anggaran K/L TA. 2024 dalam rangka Pergeseran Anggaran K/L pada Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Karantina Indonesia. Sehingga total Pagu Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2024 menjadi Rp13.563.435.046.000,00 (tiga belas triliun lima ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat puluh enam ribu rupiah).
  - c) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai *Automatic Adjustment* Kementerian Pertanian berdasarkan surat Menteri Keuangan tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2024 sebesar Rp453.043.044.000,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar empat puluh tiga juta empat puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari Program Dukungan Manajemen, sebagian dari Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta Program Ketersediaan Akses Konsumsi Pangan Berkualitas.
  - d) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2024 sebesar Rp5,8 triliun untuk mendorong produksi padi di seluruh Indonesia melalui kegiatan pompanisasi lahan kering, optimalisasi

lahan rawa mineral, padi gogo, penyediaan benih bermutu, dan lain-lain.

- e) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam merancang program dan kegiatan agar berdasarkan pada kebutuhan petani, peternak, dan pekebun sesuai dengan agroekosistem dan potensi komoditas andalan daerah, diantaranya penyediaan pupuk yang mencukupi, benih/bibit bermutu dan berkualitas, infrastruktur pertanian, hingga alat dan mesin pertanian.
  - f) Komisi IV DPR RI menyetujui dan meminta Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian untuk mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dengan catatan pengawasan dalam penyaluran dan pendistribusiannya harus ditingkatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan.
  - g) Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk menyampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang memberikan harga gas murah bagi 7 (tujuh) sektor, salah satunya pupuk yang akan menjamin keterjangkauan harga pupuk bagi petani.
- 2) **Raker** dengan **Menteri Kelautan dan Perikanan**, tanggal 14 Maret 2024 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mengapresiasi realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, sebesar Rp6.335.595.925.317,00 (enam triliun tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) atau sebesar 98,15% dari Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp6.455.280.145.000,00 (enam triliun empat ratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
  - b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 Pasca Realokasi ke Badan Karantina Indonesia sebesar Rp172.743.616.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan *Automatic Adjustment* sebesar Rp505.139.048.000,00 (lima ratus lima miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah), yang semula sebesar Rp7.103.764.437.000,00 (tujuh triliun seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) sehingga pagu efektif Kementerian Kelautan dan Perikanan

menjadi sebesar Rp6.425.881.773.000,00 (enam triliun empat ratus dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap berkomitmen tidak merealokasi program dan kegiatan tahun 2024, khususnya program prioritas dan program yang bersentuhan kepada masyarakat. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan integrasi dan kolaborasi lintas sektor, BUMN dan swasta agar pembangunan bidang kelautan perikanan dapat optimal di berbagai daerah.
  - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera melaksanakan sosialisasi juknis bantuan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran tahun 2024 di lingkup Eselon I agar program dan kegiatan yang telah diproyeksikan berjalan baik dan berdampak positif kepada masyarakat.
  - e) Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera merealisasikan kegiatan Kampung Nelayan Modern tahun 2024 di 10 (sepuluh) titik lokasi sesuai dengan potensi perikanan di daerah.
- 3) **Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, tanggal 14 Maret 2024 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
- a) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Tahun 2023, sebesar Rp7.166.204.815.034,00 (tujuh triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus empat juta delapan ratus lima belas ribu tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 98,36% dari Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp7.285.958.261.000,00 (tujuh triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
  - b) Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai *Automatic Adjustment* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove berdasarkan surat Menteri Keuangan S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA. 2024 sebesar Rp424.796.273.000,00 (empat ratus dua puluh empat miliar tujuh

ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

- c) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tetap berkomitmen tidak mengurangi target kinerja pada Tahun 2024 dan tidak mengurangi komitmen terhadap kegiatan berbasis masyarakat serta pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan integrasi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan BUMN maupun pihak swasta, agar pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat dilaksanakan secara optimal di berbagai daerah.
- d) Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pendalaman terkait implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

## b. Rapat Dengar Pendapat

- 1) **RDP dengan Kepala Badan Pangan Nasional**, tanggal 13 Maret 2024 membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu aktual lainnya, memutuskan:
  - a) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional agar dalam menugaskan Perum BULOG dan *ID FOOD* melakukan penyerapan pangan (diantaranya gabah/beras dan jagung), mengutamakan pengadaan dalam negeri guna menjaga harga di tingkat petani yang akan digunakan sebagai cadangan pangan pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
  - b) Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras setelah melalui hasil kajian yang komprehensif.
  - c) Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional melalui Perum BULOG agar mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh pasar tradisional serta tidak menjadikan pasar induk sebagai satu-satunya barometer stok dan harga.
  - d) Komisi IV DPR RI mendorong agar Badan Pangan Nasional memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk menyelenggarakan Cadangan Kedelai Pemerintah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.



### **c. Rapat Dengar Pendapat Umum**

Tidak ada kegiatan RDPU.

### **4. Audiensi**

Tidak ada kegiatan audiensi.

### **3.3.2.4.4 Kinerja Diplomasi Parlemen**

Tidak ada kegiatan diplomasi parlemen.

**Set. Komisi IV DPR RI**